

melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik di lingkungan kerja maka harus diberlakukan tindakan yang lebih tegas.

2. Saran untuk calon pekerja yang ingin mendaftarkan diri harus lebih mengerti, mengenali, serta mengikuti apa saja prosedur, peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 19

F.X. Djumialdji, S.H., M.Hum, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 7

Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009)

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), halaman 53

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. 11, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), halaman 195

Muhamad Azhar, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang: Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Semaang, 2018), halaman 3

- Pratama, Chandra Bayu, *Pengaruh Citra Bank dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menabung Dengan Variabel Mediasi Word Of Mouth Pada Nasabah Bank Mandiri Di Surabaya*, (Surabaya: Stie Perbanas Surabaya, 2017)
- Rachmawati Pratiwi, *Hubungan Antara Kepribadian Dengan Turnover Pada Karyawan Bagian Sales Consumer Loan Di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013)
- Solechan, *Rekrutmen Program Pemagangan ke Jepang: Suatu Tinjauan Program Pemerintah Daerah*, (Semarang: Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018), halaman 329
- Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Wulandari, Sri Rahayu, *Efek Mediasi Kepuasan Kerja Dalam Hubungan Antara Stres Kerja dan Turnover Intention Karyawan Bagian Marketing Unit Mikro PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Cirebon*, (Cirebon: Universitas Widyatama, 2016)
- Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), halaman 140
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), halaman 65

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta.

4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI. No. Kep 150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000 tentang Penyelesaian Putusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, uang pengharagaan, masa kerja dan ganti rugi di perusahaan.
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI. No. Kep 150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000 tentang Penyelesaian Putusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, uang pengharagaan, masa kerja dan ganti rugi di perusahaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Upah Minimum.
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100/MEN/VI/2004 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penanguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang penyelesaian PHK dan uang pesangon, uang pengharagaan, masa kerja dan ganti rugi perusahaan.